

IMPLEMENTASI PROGRAM DESA KELUARGA BERENCANA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT STUDI KASUS GEGUNTUR MATARAM

* Muhammad Ali, Mohammad Junaidi, Abdul Hafiz

Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Mataram, m-ali@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 12 -06 - 2019

Disetujui: 20 -07 - 2019

Kata kunci:

Implementasi

Kebijakan Publik

Desa Keluarga Berencana

Kesejahteraan Masyarakat

Implementation Public Policy

Family planning Village program

Welfare of the Community

ABSTRAK

Abstrak: Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70 / SJ / 2016 tentang pembentukan Desa KB dan mengambil arahan dari Presiden Republik Indonesia. Rencana BKKBN Nusa Tenggara Barat untuk 2017 telah membentuk 114 desa berencana di 10 kabupaten / kota. Program Kb adalah interaksi untuk mengatasi masalah sosial masyarakat, yaitu definisi kepadatan penduduk, permukiman kumuh, kemiskinan. Kota Mataram dengan 6 deposit salah hanya berhasil di lingkungan geguntur, kecamatan Sekarbela, disetujui oleh BKKBN RI sebagai pedoman dalam mengimplementasikan desa-desa KB di beberapa daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan studi dokumen dan menggunakan model interaktif analisis data kualitatif (Miles, Hubernas & Saldana, 2014). Temuan di lapangan Artikel terkait untuk pelaksanaan program KB KB di kota Mataram Lingkungan geguntur belum optimal secara keseluruhan, ini ditunjukkan oleh konflik atau masalah seperti masalah partisipasi masyarakat yang rendah, kurangnya pelaksana dalam KB kebijakan program desa, dan hasil lingkungan guntur yang menjadi pusat perhatian pemerintah atau semua OPD yang dapat diambil oleh beberapa daerah menjadi tidak dipertimbangkan.

Abstract: Based on Circular Letter of the Minister of Home Affairs Number 440/70 / SJ / 2016 concerning the establishment of KB Village and taking the direction of the President of the Republic of Indonesia. BKKBN West Nusa Tenggara plans for 2017 have formed 114 family planning villages in 10 districts / cities. The Kb program is an interaction to overcome the social problems of the community, namely the definition of population density, slums, poverty. The city of Mataram with 6 wrong deposits only succeeded in the geguntur environment, Sekarbela sub-district, approved by the RI BKKBN as a guideline in implementing KB villages in several regions. The research method used is a qualitative method using descriptive. With the technique of collecting data from interviews, observation, and document studies and using qualitative data analysis interactive models (Miles, Hubernas & Saldana, 2014). Findings in the field Related articles for the implementation of the KB family planning program in the city of Mataram The environment of geguntur has not been optimally overall, this is indicated by conflicts or problems such as low community participation issues, lack of implementers in the KB village program policies, and the results of thunder environment the center of government interest or all the OPDs that can be taken by several regions become not considered.

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan Program Keluarga Berencana diakui telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi di hampir semua negara. Kini, program KB diyakini menjadi instrumen penting dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) di 2030. Di banyak negara, program KB tidak hanya berhasil mengendalikan jumlah penduduk, tetapi kualitasnya juga semakin baik. Permasalahan (KB) diberbagai

negara menjadi pusat perhatian dunia akan pentingnya upaya penanggulangan dini untuk membentuk keluarga sejahtera, ini terjadi diberbagai negara seperti india, indonesia dan negara-negara lainnya dengan laju pertumbuhan penduduk.

Negara india memiliki jumlah penduduk kedua terbesar mencapai 1,2 miliar jiwa, namun demikian kebijakan KB berhasil menurunkan angka kelahiran total sampai 2,3 anak. Sebanyak 24 dari 36 negara

bagian bahkan merosot sampai 2,1. Artinya rata-rata perempuan hanya memiliki dua anak. Sedangkan di Negara Indonesia jumlah penduduk Indonesia pada 2018 mencapai 265 juta jiwa dengan laju pertumbuhan saat ini yang mencapai 1,38 persen, maka pada tahun 2020 mendatang jumlah penduduk Indonesia akan meningkat hingga 271 juta jiwa. Jumlah ini memperlihatkan adanya kenaikan sebanyak 16 ribu jiwa dari jumlah penduduk sebelumnya di tahun 2015 yang mencapai 255 ribu jiwa. Perkembangan dimasa mendatang laju pertumbuhan penduduk akan semakin meningkat ketika kebijakan pemerintah yang tidak eksklusif untuk menekan angka pertumbuhan penduduk.

Dalam RPJMN dan Resntra BKKBN tahun 2015-2019, dengan 6 (enam) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan yaitu; (1) menurunkan rata-rata Laju Pertumbuhan Penduduk tingkat nasional (persen per tahun) dari 1,38 persen/tahun tahun 2015 menjadi 1,21 persen tahun 2019, (2) menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi dari 2,37 tahun 2015 menjadi 2,28 tahun 2019, (3) meningkatnya Contraceptive Prevalence Rate (CPR) semua metoda dari 65,2 persen menjadi 66 persen, (4) menurunnya kebutuhan ber-KB tidak terlayani/unmet need dari jumlah pasangan usia subur dari 10,6 persen tahun 2015 menjadi 9,91 persen tahun 2019, (5) menurunnya Age Specific Fertility Rate (ASFR) dari 46 (pada tahun 2015) menjadi 38 per 1.000 perempuan kelompok umur 15-19 tahun pada tahun 2019, (6) menurunnya persentase kehamilan yang tidak diinginkan dari Wanita Usia Subur dari 7,1 persen tahun 2015 menjadi 6,6 persen tahun 2019 (1).

Dalam upaya pencapaian 6 (enam) Sasaran Strategis diatas, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) diharapkan dapat menyusun suatu kegiatan yang dapat memperkuat upaya pencapaian target atau sasaran yang secara langsung bersentuhan dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk menjawab tantangan tersebut digagaslah program Kampung KB.

Pembentukan Kampung KB harus dilakukan melalui analisa data dengan perhatian kriteria umum dan kriteria khusus. Kriteria umum Kampung KB seperti angka kemiskinan cukup tinggi, padat penduduk, di daerah perbatasan, di daerah kumuh, di daerah pesisir, bantaran kereta api, daerah aliran sungai dan daerah terpencil. Sedangkan kriteria khusus seperti pencapaian peserta KB rendah, pencapaian peserta KB Metode KB Jangka Panjang (MKJP) masih rendah, jumlah unmetneed masih tinggi, pertumbuhan penduduknya kurang terkendali, pelayanan KB yang belum optimal, pencapaian pembangunan keluarga melalui 8 fungsi keluarga juga belum optimal, sehingga kampung/dusun yang terpilih tampak jumlah anak per Pasangan Usia Subur di atas 3 orang atau lebih. Selain itu, partisipasi keluarga dalam program pemberdayaan peningkatan

ekonomi masih rendah serta sarana kehidupan keluarga tampak masih rendah.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/70/SJ/2016 tentang pembentukan Kampung KB dan mengikuti arahan Presiden RI. BKKBN Nusa Tenggara Barat menargetkan di tahun 2017 sudah terbentuk 114 kampung keluarga berencana di 10 kabupaten/kota. "Target 2017 itu, satu kecamatan satu kampung KB, sehingga total 144 sesuai dengan jumlah kecamatan di NTB. "Secara keseluruhan jumlah kampung KB yang sudah terbentuk di NTB sejak diluncurkan Presiden Joko Widodo di tahun 2016 mencapai 89 di 10 kabupaten/kota mulai Mataram, Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan kota Bima.

Kota Mataram terdiri dari 6 Kecamatan dan 50 Kelurahan. Pada tahun 2017, Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,56 persen, saat ini Kota Mataram yang masuk kategori Kota Sedang dengan jumlah penduduk 419.641 jiwa, kepadatan penduduk sudah mencapai angka 6.846 jiwa/km². Dengan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Mataram sebanyak 67.699 jiwa dan peserta KB aktif sebanyak 50.882 akseptor atau sebanyak 75,16 persen, tahun 2014 ini pihaknya bertekad untuk meningkatkan angka Pemenuhan Permintaan Masyarakat (PPM) untuk menjadi peserta KB sebanyak 10.237 akseptor.

Perbandingan antara jumlah penduduk kota Mataram masih dalam angka yang sewajarnya dibandingkan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu Kabupaten lombok Barat tercatat 644.586 jiwa. Lombok Barat dengan 122 desa dan mempunyai 230 ribu KK. Dari jumlah tersebut, ada 146 ribu pasangan yang masih subur. Ledakan penduduk di Lombok Barat juga cukup mengkhawatirkan. Perlu ada upaya untuk menahan lajunya yakni lewat program KB yang di terapkan wilayah Kota Mataram seperti salah satunya yang dipilih pemerintah kota Mataram dalah Lingkungan Geguntur Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela sebagai Kampung KB. Geguntur sebagai Kampung KB karena lingkungan yang bersangkutan telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Yaitu jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 yang diatas jumlah rata-rata, keikutsertaan KB yang masih berada dibawah rata-rata, serta kriteria lain yang ditentukan oleh pusat.

Lingkungan Geguntur termasuk dalam kategori kawasan miskin perkotaan dan termasuk wilayah padat penduduk. Sampai pada Desember 2015 memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.750 jiwa. Dari jumlah penduduk yang ada, jumlah KK Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 sebanyak 94,26 persen. Sedangkan jumlah peserta KB aktif baru mencapai 67,93 persen dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS). Angka partisipasi penduduk usia sekolah juga rendah, dimana penduduk tidak tamat SD sampai tamat SD dan SLTP sebesar

91,80 persen, lebih rendah dari rata-rata ditingkat Kelurahan Jempong Baru yang sebesar 71,91 persen.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dapat membawa para peneliti lebih dekat ke objek yang sedang dipelajari karena mereka secara langsung mengamati objek; dengan kata lain, para peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian utama (instrumen manusia).

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan menggunakan metode: pertama, wawancara; yang dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi dan dilakukan dengan cara yang tidak terstruktur secara formal; kedua, observasi; yang dilakukan dengan mengamati langsung di aktivitas (peristiwa yang terjadi di lapangan); ketiga, dokumen; di mana para peneliti meninjau literatur atau dokumen dan mendokumentasikan foto yang relevan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

Analisis data kualitatif menggunakan model interaktif. Dalam menganalisis data kualitatif, model interaktif memiliki beberapa tahapan, yaitu:

- Kondensasi Data:** data yang diperoleh dari penelitian dikompres sedemikian rupa untuk menganalisis hasil yang dilakukan selama penelitian.
- Tampilan Data:** organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian; ini membuat para peneliti mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang dilakukan
- Kesimpulan Gambar:** dari awal pengumpulan data, para peneliti memahami hal-hal yang sedang dipelajari dengan mencatat aturan dan pola, serta membuat pernyataan konfigurasi dan arah sebab akibat. Jadi, kesimpulan dalam tahap analisis data adalah satu kesatuan kegiatan sebelum, selama dan setelah mengumpulkan data dalam bentuk paralel untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis data. Tiga kegiatan utama dalam analisis data dan kegiatan pengumpulan data adalah proses siklus interaktif

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sasaran kampung KB utamanya adalah penduduk yang tinggal di wilayah miskin, padat penduduk, kurang memiliki akses kesehatan, terpencil, pesisir, kumuh dan kesertaan ber KB nya rendah.

Namun, dalam dua tahun pencaangan Kampung KB, pelaksanaan di lapangan belum seperti yang diharapkan. Dari 240 lokasi kampung KB yang telah dicanangkan di NTB, terdapat variasi yang sangat besar dalam

pelaksanaan di lapangan. Permasalahan utama yang ditemui di lapangan adalah tidak adanya kegiatan lanjutan setelah pencaangan. Hal ini disebabkan oleh banyak factor misalnya, pertama, kurangnya pemahaman pemangku kepentingan di setiap level akan konsep kampung KB, tidak adanya penggerak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam Kampung KB, kurangnya dukungan lintas sektor dan sebagainya. Untuk itu dianggap perlu untuk menyiapkan Kampung KB percontohan. Metode pendekatan implementasi George Edward III menekankan keberhasilan implementasi setidaknya menjadi tolak ukur untuk menilai keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Secara teoritis seharusnya para implementor memahami apa yang menjadi isi dan kejelasan kebijakan program KB. Sebagaimana Edward III 1980 h. 17 menekankan implementasi efektif ketika mengetahui apa yang akan dikerjakan, pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan baru dapat berjalan manakala komunikasi berjalan dengan baik sampai pada sasaran dan implementor.

Serupa dikatakan Metter dan Horn (1975), mempertegas keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti standar kebijakan dan sasaran komunikasi inter organisasi dan aktivitas pengukuhan karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan karakter pelaksana. Mazmanian dan Sabatier (1983) terkait dengan aspek komunikasi, sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagaimana kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rincinya isi sebuah kebijakan mudah di implementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata.

Kedua, persoalan rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam program KB. Jumlah penduduk lingkungan geguntur, Kota Mataram sebagai fokus penelitian berjumlah 1.823 penduduk, jumlah kepala keluarga 560. Selain itu dengan persentasi jumlah penduduk yang mengikuti program kampung KB diantaranya ;

Tabel 1. Peserta aktif KB Lingkungan geguntur

NO	UPAYA	PESERTA (%)
1	IUD	22
2	MOW	5
3	Implant	10
4	Suntikan	223
5	Pil	3

Sumber ; dinsos Kota Matram, 2019

Tabel 1 menunjukkan keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam program kampung KB masih rendah dibandingkan rasio jumlah kepala keluarga 560. Sedangkan penduduk yang tidak mengikuti peserta KB merupakan pasangan usia subur (PUS) diantaranya;

Tabel 2. Peserta bukan KB lingkungan geguntur

NO	UPAYA	PESERTA (%)
1	Hamil	30
2	Ingis Anak	27
3	Ingin Anak	14

		Tunda	
4	Tidak Ingin Anak Lagi		16

Sumber. Dinsos Kota Mataram, 2019.

Tabel 1 dan 2 merupakan interpretasi empiris dalam aspek implementasi kebijakan program kampung KB yang dicanangkan oleh BKKBN di Kota Mataram. 6 kecamatan di Kota Mataram dengan lingkungan geguntur kecamatan sekarbela, Kota Mataram yang terpilih menjadi program kampung KB yang dinilai berhasil dibandingkan kecamatan lainnya. Temuan secara keseluruhan program KB di tahun 2016 di kota Mataram memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah Kota Mataram, masyarakat, tokoh masyarakat, dan akademisi.

Aspek implementasi program KB tahun 2016 sejauh ini memperoleh 7.469 Peserta atau 81,87% dari PPM PB sebanyak 9.123 Peserta. Apabila dilihat per metode kontrasepsi, maka persentase pencapaian peserta KB Baru di tahun 2016 adalah sebagai berikut ;

Tabel 3. Pencapaian peserta KB tahun 2016

NO	UPAYA	PESERTA (%)
1	IUD	2.086 (27,93%)
2	MOW	165 (2,21%)
3	MOP	0
4	Kondom	195 (2,61%)
5	Implant	948 (12,69%)
6	Suntikan	3,412 (45,68%)
7	Pil	663 (8,88%)

Sumber: Profil BPPKB, 2016.

Total keseluruhan peserta KB tahun 2016 pada tabel 3 adalah sebanyak 7.469 peserta dengan upaya intrauterine device (IUD), alat kontrasepsi dalam rahim, kondom, PIL KB, suntikan dan implant serta MOW (Metode Operatif Wanita).

Selain itu program kampung KB dari tahun 2016 hingga 2018 dilakukan evaluasi untuk menilai sejauh mana aspek implementasi program kampung KB memberikan kontribusi bagi masyarakat, diantaranya ;

INDIKATOR	KONDISI AWAL	TRI – WULAN			
		I	II	III	IV
Kesertaan ber-KB ;	310	315	332	340	350
a. PUS					
b. Peserta KB Aktif	221	227	236	250	263
Kesertaan Metode KB Jangka Panjang	16	28	30	33	35

Sumber : Dinsos Kota Mataram, 2019

Berdasarkan kesertaan berKB selama triwulan baik peserta PUS maupun KB aktif selama triwulan mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut tidak di dukung dengan pemahaman masyarakat yang mendalam tentang program kampung KB apa yang menjadi sasaran dan target utama dari program kampung KB.

Selain itu, mengingat program KB tidak hanya fokus dalam persoalan menekan pertumbuhan penduduk melainkan persoalan kemiskinan, rumah tidak layak huni. Adanya Peraturan Menteri Desa PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 memberi peluang Program KKBPK mendapat dukungan anggaran kegiatan dari Dana Desa. Dari 206 Desa yang telah mencanangkan Kampung KB di Provinsi NTB, 51 desa diantaranya atau 24,76 persen telah memiliki dokumen PERDES yang mendukung Program KKBPK. Capaian jumlah PERDES yang mendukung Program KKBPK di desa yang terbentuk Kampung KB masih lebih rendah dari target capaian sebesar 25%. Adapun jumlah Dana Desa yang dianggarkan untuk mendukung kegiatan Program KKBPK mencapai Rp. 946.200.000,- atau rata-rata setiap desa mengalokasikan anggaran DD untuk Program KKBPK sebanyak Rp. 18.552.000.

Jumlah anggaran 18.552.000 pertahunnya diperuntukkan dari masing-masing desa termasuk lingkungan geguntur kota Mataram. Berdasarkan hasil dilapangan sehubungan rumah yang direnovasi menjadi layak huni berjumlah 6 rumah. Transparan anggaran merupakan prinsip dasar pemerintahan yang baik yang seharusnya menjadi konsumsi publik untuk dapat menilai anggaran yang diberikan, namun keterlibatan berbagai aktor dan lintas sektor yang mengakibatkan susahny dalam realisasi anggaran. Sebagaimana dikatakan Edward III walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya seperti halnya ketersediaan anggaran, implementasi tidak akan berjalan secara efektif.

Pandangan lainnya Grindle (1980) keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai, agar memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan isi dari kebijakan yang hendak diimplementasikan. Darwin (1998) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh sumber-sumber yang terlibat, dalam hal sumber daya aparatur sebagai pelaksana kebijakan dan sumber pendanaan. Van Meter dan Van Horn (1975) lebih melihat keberhasilan implementasi kebijakan dari aspek sumber daya yaitu bagaimana tersedia sumber-sumber kebijakan, termasuk di dalamnya adalah sumber daya aparatur/ implementor dan anggaran.

Mazmanian dan Sabatier (1983) lebih pada aspek besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan yang hendak di implementasikan. Tersedianya sumber dana yang memadai akan menjadi faktor pendorong keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. perdebatan teoritik pentingnya sumber daya seperti anggaran merupakan faktor terpenting dalam implementasi kebijakan Program kampung KB di lingkungan Geguntur, Kota Mataram. Dengan demikian bahwa sejauh ini persoalan anggaran yang belum secara optimal atau merata kepada seluruh masyarakat berdampak pada point penting pada keberhasilan aspek implementasi kebijakan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

analisis teoritis dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan (sebagai mana teori Edward III thn 1980) program kampung KB menunjukkan hasil sesuai dengan yang diharapkan oleh policy maker (pembuat kebijakan). Sosialisasi dan komunikasi melalui forum kampung KB, ketersediaan sumberdaya (Manusia, Anggaran dan infra Struktur lainnya) telah memadai, namun demikian belum optimalnya pelaksanaan terkendala rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan program kampung KB, selain itu rendahnya pemahaman implementor terhadap isi kebijakan program kampung KB. Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang mendalam dari masing-masing implementor/lintas sektor serta masyarakat, sehingga akan terbangun relasi antar aktor yang menciptakan public service.

[11] Nintrafil, Linda. 2006. Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Di Desa Percut Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang.: Skripsi.Tidak Terbit.Di unduh [http://digilib.uinsgd.ac.id]. (18/12/18).

DAFTAR RUJUKAN

- [1] BKKBN. 2015. Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019. Jakarta: BKKBN.
- [2] Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. Analisis Data Kualitatif. Terjemah oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesi.
- [3] Profil BPPKB Kota Mataram. 2016. Melalui (Online) sip-ppid.mataram.kota.go.id/file/profile-bppkb-kota-mataram.pdf. (17/6/2019).
- [4] Edward III, George C. 1980. Implementing Publik Policy. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Inc.
- [5] Grindle, Marilee, (ed.) 1980. Politics and Policy Implementation in the Third World. Princeton. New Jersey: Princeton.
- [6] Biro Perencanaan Badan Kependudukan Keluarga Brencana Nasional. 2015. Petunjuk Teknis Kampung KB. [http://babel.bkkbn.go.id/infoprogram/Documents/JUKNIS%20KAMPUNG%20KB.pdf]. Diakses (01/6/19).
- [7] ANTARANTB. 2017. BKKBN NTB Targetkan Bentuk 14 Kampug KB. [https://mataram.antaranews.com/berita/32445/bkkbn-ntb-targetkan-bentuk-114-kampung-kb] . Diakses (11/6/19).
- [8] Miles, M.B & Huberman A.M. 1984. Analisis Data Kualitatif. Terjemah oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- [9] Wahab, Solichin Abdul. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Pn. UMM Press. Malang
- [10] Wahab, Solichin Abdul. 1997. Analisis Kebijaksanaan;Dari Formualsi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Pn. Bumi Aksara. Jakarta.